

## **II. Tinjauan Pustaka, Kerangka Fikir dan Paradigma**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Konsep Peranan**

Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status (kedudukan). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya. Peranan adalah tingkah laku dari orang yang memiliki kedudukan atau status. ([http://www.Google.com/modulOnline/Pengertian Peranan](http://www.Google.com/modulOnline/Pengertian%20Peranan)). lebih lanjut peranan menurut Koentjaraningrat merupakan suatu peranan khas yang dipentaskan atau ditindakan oleh individu dalam kedudukan dimana ia berhadapan dengan individu-individu dalam kedudukan lain (Koentjaraningrat, 1986 : 169).

Konsep peranan menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar mengatakan bahwa yang dimaksud peranan itu meliputi 3 hal yakni :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1982 : 269)

Peranan ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu, peranan yang dapat dipelajari sebagai bagian dari individu (Cohen, 1992:76). Peranan dalam hal ini sebagai tindakan nyata yang dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama yang sesuai dengan status atau kedudukannya untuk mencapai tujuan tertentu.

Cohen juga menyatakan bahwa dalam melaksanakan suatu peranan tertentu kita diharapkan oleh masyarakat agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Keadaan semacam ini disebut sebagai “Prescribed role” (peranan yang dianjurkan). Tetapi, adakalanya orang-orang yang diharapkan ini tidak berperilaku konsisten terhadap harapan-harapan orang lain. Keadaan seperti itu disebut dengan “Enacted role” (peranan nyata) yaitu keadaan sesungguhnya dari seseorang dalam menjalankan peranan tertentu (Bruce J. Cohen, 1992 :81).

Ketidakselarasan pelaksanaan kedua peranan tersebut mungkin disebabkan oleh :

1. Kurangnya pengertian para individu terhadap persyaratan-persyaratan bagi peran yang harus ia jalankan.
2. Kesengajaan untuk bertindak menyimpang dari persyaratan peran yang diharapkan.
3. Ketidakmampuan individu memainkan peran tersebut secara efektif.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa peranan merupakan kemampuan seseorang atau individu dalam memainkan fungsinya untuk bertindak secara efektif dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Menurut pendapat dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peranan yang dilakukan Mayor Jenderal Sudarsono dalam keterlibatannya pada peristiwa 3 Juli 1946 merupakan peranan nyata “Enacted role” dimana upaya yang dilakukan Mayor Jenderal Sudarsono yang berposisi atau berkedudukan sebagai perwira tinggi militer seharusnya menjaga stabilitas Negara yang sedang dalam krisis hebat dan berupaya menengahi kekisruhan para politisi justru malah terlibat di dalamnya, maka peranan mayor pada waktu itu bisa dikatakan tidak konsisten dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Apabila dilihat dari konsep peranan yang dilakukan Mayor Jenderal Sudarsono dalam organisasi ialah sebagai pemimpin. Menurut Kartini Kartono pemimpin adalah seorang yang mengendalikan kegiatan pengaturan dalam organisasi agar terjadi ketertiban dalam kegiatan organisasi, perlu ada pengaturan mengenai pembagian tugas, cara kerja, dan hubungan antara yang satu dengan yang lain serta pribadi yang satu dengan yang lain. (Kartini Kartono. 1994 : 7)

Sebagai pemimpin Mayor Jenderal Sudarsonono memiliki wewenang, dan untuk menjalankan peranannya ia menggunakan wewenangnya untuk melakukan pengaturan, dalam kajian ini mengatur keamanan dan ketertiban karena situasi negara yang tidak stabil pada saat itu dengan member perintah untuk kepada bawahannya untuk menculik Syahrir.

## 2. Konsep Peristiwa

Peristiwa adalah sejarah, maka sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa pada masa lampau dan menyangkut manusia sebagai makhluk sosial, dapat dijadikan pedoman untuk menentukan kebijaksanaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk mengetahui dan memahami kebenaran dari peristiwa atau sejarah itu sendiri maka perlu dikemukakan pengertian peristiwa menurut pendapat beberapa ahli. Mengenai peristiwa atau kejadian ini Soemardjo, 1961 seperti dikutip oleh Ali Imron mengemukakan :

Apa saja yang terjadi dan berbentuk dalam masa lampau adalah kejadian. Semua kejadian terutama yang menyangkut kehidupan manusia menjadi perbincangan sejarah. Dengan demikian tidak teringgalah jumlah kejadian di bumi ini, sejak bumi ada hingga kini. Jumlah kejadian itu akan lebih besar lagi bila diketahui bahwa yang dimaksud kejadian itu bukan saja hal-hal yang dapat diraba dengan tangan dan dilihat oleh mata, tetapi juga yang pernah dicita-citakan manusia dan ditakutinya (Ali Imron, 1995 : 3).

Jadi suatu peristiwa menjadi perhatian dan menarik apabila pengalaman manusia, dan apa-apa yang dialami manusia dimasa lampau dan kehidupannya di masa lampau. Banyak manusia yang menjadikan pengalamannya sebagai ilmu dan bagian objek studinya meskipun dengan cara dan titik perhatian yang berbeda. Banyak juga para sejarawan yang tertarik dengan peristiwa masa lampau tersebut, namun perlu dilihat dari segi aspek yang mana yang menjadi perhatian utama sejarawan dalam studi terhadap masa lampau itu. Dan para sejarawan tertarik pada aspek peristiwa sebagai (event), peristiwa khusus, dan dimensi kronologis. Menurut Maskun dalam bukunya yang berjudul *Manusia Dan Sejarah* mengatakan bahwa :

Dalam hal ini kelihatannya sejarawan terutama tertarik pada aspek-aspek tertentu dari pengalaman masa lampau yaitu tentu saja tertarik terhadap (1) peristiwa sebagai suatu (event), bukannya bagaimana adanya atau adanya peristiwa tersebut sebagai suatu gejala yang bisa diisolasikan dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Selanjutnya dalam mengkaji peristiwa sebagai peristiwa tentu mereka menaruh perhatian pada (2) peristiwa khusus (particulars), yaitu peristiwa-peristiwa yang meskipun mungkin ada persamaan jenisnya dengan peristiwa-peristiwa lainnya, tetapi tidak pernah sama betul (identik) dengan peristiwa-peristiwa lainnya itu. sejarawan juga tertarik pada (3). Dimensi kronologis (urutan perkembangan dari peristiwa untuk mengartikan perubahan atau perkembangan (change) yang menjadi landasan utama bagi persambungan/urutan-urutan peristiwa-peristiwa tersebut. Akhirnya oleh karena segala sesuatu di masa lampau hakekatnya “mensejarah” (mengandung unsur historis), maka sejarah secara lebih luas mencakup materi dari semua ilmu sosial dan humaniora (Maskun, 2008:16-17).

Peristiwa adalah suatu bentuk kejadian yang dialami dan menyangkut kehidupan manusia baik yang benar-benar terjadi, dan yang pernah direncanakan atau dicitakan oleh manusia itu sendiri meskipun banyak kesamaan namun setiap peristiwa pastilah berbeda, membahas suatu peristiwa sama saja membahas sejarah manusia dengan begitu sejarah lebih luas cakupannya dari ilmu-ilmu yang lain ketika menjadi suatu peristiwa, peristiwa sendiri dalam hal ini terutama yang bersifat khusus dari segi-segi urutan perkembangan yang kemudian disusun dalam suatu cerita sejarah.

### **3. Konsep Peristiwa 3 Juli 1946**

Peristiwa 3 Juli 1946 adalah suatu peristiwa yang dilakukan untuk mencoba meruntuhkan atau mengganti pemerintahan yang sudah terbentuk pada masa itu yakni pemerintahan Perdana Menteri Syahrir. Peristiwa 3 Juli 1946 muncul karena kekecewaan para politisi terhadap kinerja pemerintah yang dianggap gagal dalam

menangani krisis politik dan terlalu lunak dalam menghadapi Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia.

Perbedaan pandangan politik antara oposisi dan pemerintah pada waktu itu membuat jurang perpecahan semakin lebar dimana pihak oposisi menginginkan perjuangan yang 100% merdeka sedang pemerintah menginginkan jalur diplomasi. Hal ini menimbulkan penculikan terhadap Perdana Menteri Syahrir pada waktu itu.

Pada 23 Maret 1946, tokoh-tokoh kelompok Persatuan Perjuangan antara lain Tan Malaka, Subardjo, dan Sukarni ditangkap dengan tuduhan bahwa kelompok ini berencana untuk mengganti kabinet. Hal ini membuat tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan lainnya bergerak untuk mencari dukungan salah satunya ialah Mayor Jenderal Sudarsono, seorang perwira yang menjabat sebagai Panglima Divisi III yang membawahi Kedu, Pekalongan, dan Yogyakarta. Mayor Jenderal Sudarsono tergabung dalam Persatuan Perjuangan untuk meneruskan program Persatuan Perjuangan yang ingin merdeka 100% yang tidak berjalan baik karena tokohnya banyak yang ditangkap oleh pemerintah. Salah satu upaya yang ditempuh Mayor Jenderal Sudarsono salah satunya adalah dengan melakukan penculikan terhadap perdana menteri Syahrir yang programnya dianggap gagal dalam menangani krisis.

Alasan kaum oposisi membidik Syahrir ialah perayaan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW di alun-alun utara Yogyakarta memicu ketidakpuasan pada sejumlah pihak di luar pemerintahan. Pidato Wakil Presiden Muhammad Hatta tentang permintaan pemerintah kepada Belanda agar mengakui de facto atas Jawa dan Sumatera dinilai amat merugikan Indonesia. ( M. Yuanda Zara, 2009 : 170 ).

Pada tanggal 27 Juni 1946, Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan beberapa anggota kabinet diculik oleh orang-orang Persatuan Perjuangan dibawah komando Mayor Jenderal Sudarsono. Pada tanggal 28 Juni 1946, Presiden Soekarno menyatakan keadaan bahaya di Indonesia. Keesokan harinya, seluruh kekuasaan pemerintahan diserahkan kembali kepada Presiden Republik Indonesia.

Tanggal 3 Juli 1946, Mayor Jendral Sudarsono, pelaku utama penculikan yang sehaluan dengan kelompok Persatuan Perjuangan, menghadap Soekarno bersama beberapa rekannya dan menyodorkan empat maklumat untuk ditandatangani Presiden, yang menuntut agar Presiden memberhentikan Kabinet Sjahrir II Presiden menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik . Presiden mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik yang nama-namanya dicantumkan dalam maklumat Presiden mengangkat 13 menteri negara yang nama-namanya dicantumkan dalam maklumat Soekarno tidak menerima maklumat tersebut dan memerintahkan penangkapan terhadap Mayor Jenderal Sudarsono yang dianggap ingin merebut kekuasaan terhadap pemerintah secara paksa.

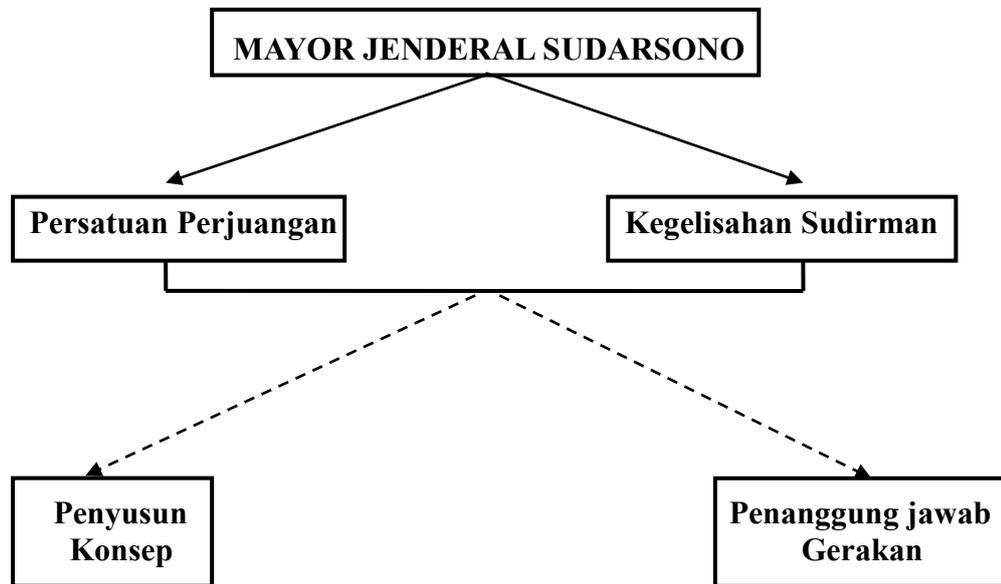
Penculikan terhadap Perdana Menteri Syahrir inilah yang menjadi penyebab utama lahirnya peristiwa 3 Juli 1946 yang sebelumnya terjadi perbedaan pendapat antara pihak Persatuan Perjuangan dengan pemerintah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

## **B. Kerangka Pikir**

Mayor Jenderal Sudarsono adalah seorang perwira yang menjabat sebagai Panglima Divisi III yang membawahi Kedu, Pekalongan, dan Yogyakarta. Selaku panglima pada bidang keamanan negara Jenderal Sudarsono merasa mempunyai kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, para pejuang yang tergabung dalam pemuda, politisi dan militer membentuk suatu oposisi yang bersifat radikal dalam mempertahankan negara bernama Persatuan Perjuangan. Mereka mengisyaratkan untuk memperjuangkan merdeka 100% dan mencoba menghadapi gangguan dari luar tanpa jalur diplomasi. Hal ini ditentang oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu yakni Perdana Menteri Syahrir. pemerintahan Syahrir cenderung terbuka terhadap Belanda ditambah dengan pemerintahannya yang dianggap gagal menangani masalah di dalam negeri dan justru menimbulkan kekacauan baik dalam pemerintahan maupun pertahanan khususnya militer, maka pihak oposisi di bawah pimpinan Mayor Jenderal Sudarsono menggagas untuk menculik Syahrir. Mayor Jenderal Sudarsono adalah tokoh utama dan pemimpin aksi serta pengatur strategi dalam upaya penculikan terhadap Perdana Menteri. Peristiwa penculikan ini yang menjadi awal munculnya peristiwa 3 Juli 1946. Mayor Jenderal Sudarsono juga bertanggung jawab atas terjadinya usaha kudeta ini dengan menghadap presiden kala itu dan mendapat hukuman.

### C. Paradigma



—————→      Garis Penyebab

- - - - -→      Garis Kegiatan

## REFERENSI

Soerjono Soekanto,. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers : Jakarta.Halaman 238

Bruce. J. Cohen. 1992. *Metode Penelitian Deskriptif*. Gramedia : Jakarta. Halaman 76

Ali Imron. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandar Lampung : Unila Press. Halaman 3.

Maskun. 2008. *Manusia Dan Sejarah*. Bandar Lampung : Unila Press. Halaman 16-17.

M. Yuanda Zara. 2009. *Peristiwa 3 Juli 1946*. Media Pressindo : Yogyakarta. Halaman 170

([http://www.Google.com/modulOnline/Pengertian Peranan](http://www.Google.com/modulOnline/Pengertian%20Peranan))